

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti pada bab 5 yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut (1) Prospek Pemekaran dari segi sosiologis politis. Secara aspek sosiologis politis masyarakat secara prinsip masyarakat menyetujui akan rencana pemekaran daerah Kabupaten Agam. Namun, secara teknisnya pemekaran daerah Kabupaten Agam belum dapat memulai prosesnya karena beberapa persyaratan yang dibutuhkan belum terlengkapi. Hal ini dikarenakan beberapa forum bamus Nagari yang ada di Kabupaten Agam bagian Timur terdapat 13 Nagari yang belum memberikan persetujuannya. Adapun kesulitan yang dihadapi oleh Nagari yaitu kondisi Pandemi covid 19 sejak yang melanda Indonesia sejak awal Tahun 2020 hingga saat sekarang ini. Segala aktivitas menjadi terbatas begitu pula dengan sosialisasi pemekaran yang akan dilakukan kemasyarakat juga terhalang untuk dilaksanakan sehingga masih terdapat Nagari yang belum memberikan persetujuan akan rencana pemekaran daerah Kabupaten Agam.

(2) Prospek pemekaran dari segi Yuridis. Dari segi Yuridis, sampai saat sekarang ini pemekaran daerah masih belum bisa dilakukan karena belum dicabutnya moratorium tentang pemekaran daerah. Moratorium memang menjadi permasalahan yang sangat utama dalam melakukan pembentukan daerah otonomi baru. Peluang untuk dibukanya moratorium

pemekaran daerah akan ada jika Pemerintah pusat atau Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti PP No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan wilayah dan sebagai turunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah yang kemudian disebut dengan PP Penataan Daerah merupakan payung hukum desain besar Penataan daerah yang sampai saat ini belum dapat diterbitkan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis proses perencanaan pemekaran daerah Kabupaten Agam menjadi daerah otonomi baru, maka dengan ini peneliti membuat saran atau rekomendasi sehingga untuk peneliti berikutnya menjadi lebih jelas lagi dalam mengkaji proses perencanaan pemekaran daerah.

1. Seharusnya semua elemen terlibat dalam proses perencanaan pemekaran daerah seperti Camat dan masyarakat Nagari diikutsertakan dalam diskusi yang dilakukan. Sehingga kita dapat melihat bahwasanya ini memang kebutuhan bersama melainkan bukan kebutuhan perorangan atau berkelompok.
2. Dikarenakan keterbatasan peneliti dalam penelitian ini untuk melihat secara mendalam tentang proses perencanaan pemekaran Kabupaten Agam, maka dapat dilakukan kajian lanjutan terhadap proses persiapan pemekaran kabupaten agam yang ditinjau dari segi PAD, Sumber Daya

manusia, kondisi politik sosial ekonomi, serta kebudayaan masyarakat Kabupaten Agam.

3. Teori perencanaan sangat cocok untuk membahas perihal perencanaan pemekaran daerah dengan fenomena yang relevan. Namun untuk penggunaan teori kolaboratif menurut Healey dinilai terlalu mempunyai cakupan yang besar sehingga tidak memfokuskan pada satu hal saja misalnya komunikasi. Implikasi teori juga dapat mempengaruhi substansi pembahasan analisis pada sebuah penelitian jika analisis teoritis terlalu mengambang sehingga sulit untuk dipahami oleh pembaca.

